



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komite Audit, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud*

Vidya Loka Santi^{1*}

Zaenal Wafa²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email : 210610008@student.mercubuana-yogya.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email : zaenalwafa@mercubuana-yogya.ac.id

*Correspondent Author

Diterima: 1 Oktober 2024

Direview: 21 Oktober 2024

Dipublikasikan: 3 Desember 2024

Abstract

The significant increase in fraud cases in Indonesia's banking industry from 2016 to 2021, averaging over 300 cases per year, highlights the sector's vulnerability to fraud. The financial industry, especially banking, accounts for 22.30% of total fraud cases, negatively impacting public trust and reputation. This study aims to examine the impact of internal control systems, audit committees, and whistleblowing systems in preventing fraud in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2022. A quantitative approach is employed in this study, using secondary data from the annual reports of banking companies available on the IDX official website. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 42 banking companies that met the criteria. Data analysis was performed using panel data regression with the E-Views 12 software. The findings indicate that the internal control system and whistleblowing system have a significant effect on fraud prevention, whereas the audit committee does not have a significant impact. Collectively, however, these three variables contribute significantly to fraud prevention efforts.

Keywords: *Internal Control System, Audit Committee, Whistleblowing System, Fraud Prevention, Bank*

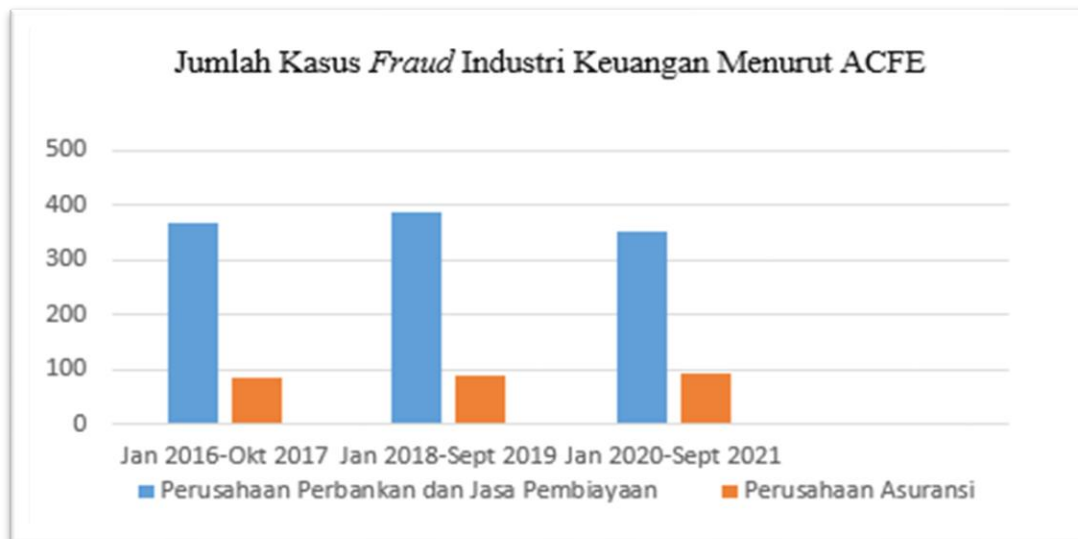
Abstrak

Peningkatan signifikan kasus *fraud* di industri perbankan Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021, dengan rata-rata lebih dari 300 kasus per tahun, menunjukkan kerentanan sektor ini terhadap kecurangan. Industri keuangan, khususnya perbankan, menyumbang 22,30% dari total kasus *fraud*, yang berdampak negatif pada reputasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dampak sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* dalam mencegah *fraud* pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI selama periode 2020-2022. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini, dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan perbankan melalui situs resmi BEI. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang menghasilkan 42 perusahaan perbankan sesuai dengan kriteria. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan perangkat lunak *E-Views 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah *fraud*, sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Komite Audit, *Whistleblowing System*, Pencegahan *Fraud*, Bank

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) adalah ancaman signifikan bagi kelangsungan organisasi yang dilakukan dengan cara yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara merugikan pihak lain (Rahmadanti, 2021). Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah dibentuk untuk mengatasi kasus kecurangan, tetapi hal itu tidak mengurangi persentase tindakan kecurangan. Kejahatan *fraud* di Indonesia meliputi berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset atau kekayaan negara, serta tindak korupsi (Pricylia & Budiantara, 2023). Pendiaman atau ketidakpedulian terhadap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) dinilai menjadi faktor terjadinya korupsi di bidang keuangan khususnya perbankan yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Jumlah Kasus *Fraud* yang Terjadi di Sektor Keuangan Berdasarkan Data ACFE

Sumber: ACFE 2018, 2020, 2021

Berdasarkan laporan survei ACFE, memperlihatkan rata-rata jumlah kasus *fraud* yang terjadi dalam industri perbankan dan jasa pembiayaan dari tahun 2016 hingga 2021 mencapai lebih dari 300 kasus setiap tahun, menunjukkan bahwa sektor perusahaan keuangan merupakan sektor yang paling rentan terhadap kejadian *fraud*, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak (Rahmadanti, 2021).

Table 1. Industri Paling Terdampak Karena *Fraud* Tahun 2022

Industri	Kasus	Presentase Kasus
Perbankan dan layanan keuangan	351	22,30 %
Pemerintahan dan administrasi publik	198	12,57 %
Manufaktur	194	12,33 %
Kesehatan	130	8,27 %
Energi	97	6,16 %
Ritel	91	5,78 %
Asuransi	88	5,60 %
Teknologi	84	5,34 %
Transportasi dan pergudangan	82	5,20 %
Konstruksi	78	4,95 %
Pendidikan	69	4,38 %
Informasi	60	3,82 %
Layanan makanan dan perhotelan	52	3,30 %
TOTAL	1.574	100 %

Sumber: ACFE 2022

Berdasarkan survei ACFE tahun 2022 yang memaparkan data *fraud* dari sektor industri. Industri perbankan dan sektor keuangan masih menduduki posisi teratas dengan presentase sekitar 22,30% dari semua sektor industri yang terpantau, dengan banyaknya kasus tercatat 351 kasus kecurangan (*fraud*) yang berdampak signifikan pada industri perbankan di Indonesia, mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Misalnya saja pada tahun 2020, PT Bank Maybank Indonesia mengalami insiden di mana salah satu nasabahnya menjadi korban pencurian dana oleh kepala cabang Maybank Cipulir, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 22 miliar. Selain itu, pada tahun 2021 juga terjadi pembobolan dana nasabah Bank Mega, dimana dana yang dibobol mencapai Rp 69 miliar milik 23 nasabah, pembobolan tersebut dilakukan oleh Kepala Cabang Bank Mega Kota Denpasar. Selain di perusahaan bank konvensional, tindakan *fraud* juga terjadi para perusahaan bank syariah, misalnya saja pada tahun 2022 terjadi kasus penggelapan pinjaman nasabah Bank BTPN Syariah Cabang Binuang sebesar Rp 55 juta yang dilakukan oleh *community officer* Bank BTPN Syariah cabang Binuang tersebut.

Hampir seluruh lembaga keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, telah mengalami insiden kecurangan, baik yang melibatkan pihak luar maupun yang berasal dari dalam entitas perusahaan itu sendiri (Tarasita et al., 2020). Dampak yang timbul akibat tindakan kecurangan dimulai dengan penurunan citra bank yang tersebar secara luas, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah, dan bahkan dapat menyebabkan peralihan dana nasabah ke bank lain. Selain menimbulkan kerugian material bagi pihak bank, tindakan kecurangan ini juga membawa risiko penurunan reputasi bank yang hampir pasti terjadi. Oleh karena itu, di dalam perusahaan, terutama di sektor perbankan, diperlukan sebuah tata kelola yang efektif untuk menangani kasus kecurangan dan tindakan-tindakan tidak jujur lainnya. Upaya untuk mencegah tindakan kecurangan tidak sebatas melibatkan penyusunan regulasi, melainkan juga mencakup implementasi pengendalian internal dan eksternal yang efisien.

Pencegahan kecurangan merupakan upaya krusial untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar serta menjaga reputasi baik institusi maupun perorangan. Jika *fraud* tidak cepat diidentifikasi dan ditangani, keterlambatan tersebut dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melanjutkan tindakan *fraud* dengan berbagai modus lain, sehingga risiko kerugian semakin meningkat. Maka dari itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mencegah pemicu-pemicu kecurangan, yang dapat dicapai melalui langkah-langkah pencegahan kecurangan, faktor-faktor tersebut yakni implementasi sistem pengendalian internal, peran yang dimainkan oleh komite audit, dan implementasi sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Ketiga komponen ini dianggap saling terkait dalam upaya mendeteksi dan mencegah *fraud* secara efektif.

Pengendalian internal adalah bagian dari strategi perusahaan yang berfungsi untuk menjaga aset, memastikan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjamin keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi (Sari & Majid, 2021). Setiap organisasi wajib mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efisien dan diterapkan secara konsisten (Rahmadanti, 2021). Sistem pengendalian internal yang kuat menjamin bahwa kegiatan perusahaan berlangsung secara efisien dan sesuai tujuan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan operasional (Agustina & Wafa, 2023). Penelitian yang dilakukan Ziah & Kuntadi (2023) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Dwi Pratopo & Wuryani (2023) memaparkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan.

Upaya pencegahan kedua yakni peran yang dimainkan oleh komite audit dalam pencegahan *fraud*. Komite audit merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dewan Komisaris guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan, serta bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015, komite audit harus menjaga independensinya, dengan ketentuan bahwa minimal ada satu anggota berkeahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Penelitian oleh Trijayanti et al. (2021) mengemukakan, komite audit berpengaruh dalam mencegah kecurangan. Namun, studi yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) dan (Rahmadanti, 2021) mengungkapkan komite audit tidak memiliki pengaruh dalam mencegah kecurangan.

Kemudian upaya pencegahan yang ketiga adalah penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) pada setiap perusahaan. *Whistleblowing* adalah tindakan melaporkan perilaku yang melanggar hukum, tidak etis, atau ilegal yang dilakukan oleh individu dalam organisasi, baik oleh

eks-karyawan maupun yang masih aktif di lingkungan kerja mereka. Secara umum, pengungkapan *whistleblowing* sering dilakukan secara rahasia. Mayoritas individu yang melakukan *whistleblowing* adalah anggota organisasi itu sendiri (internal), meskipun ada kemungkinan adanya pengungkap dari pihak luar seperti pelanggan, pemasok, atau masyarakat umum. Penelitian yang dilakukan Sugita & Khomsiyah (2023) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan, akan tetapi hasil studi dari (Anlilua et al., 2023) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen dari karyawan dalam menjalankan *whistleblowing system* dan keterlibatan mereka dalam melaporkan kasus kecurangan yang terjadi.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* telah banyak dilakukan, namun hasilnya beragam dan belum konsisten. Penelitian ini berfokus pada variabel internal perusahaan, yaitu sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system*, yang dinilai mempunyai peran sentral dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* secara internal. Sementara penelitian sebelumnya sering mencakup variabel internal dan eksternal, penelitian ini memperdalam kajian pada faktor-faktor internal yang saling berhubungan dalam menangani risiko *fraud*. Berfokus pada perspektif *fraud triangle theory*, tujuan penelitian ini untuk mengkaji interaksi dan dampak variabel yang berasal dari internal perusahaan yaitu sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan kecurangan di perusahaan perbankan, dengan mengaitkan aspek-aspek seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam mencegah *fraud* di perusahaan perbankan. Pendekatan ini dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana teori ini relevan memahami mekanisme internal perusahaan dalam mengatasi dan mencegah *fraud*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Fraud triangle theory adalah sebuah teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* merupakan sebuah kerangka teoritis yang menganalisis potensi terjadinya kecurangan oleh individu yang disebut sebagai *fraudster*. Teori ini menekankan pada tiga faktor utama yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Ketiga faktor ini dianggap sebagai pendorong utama yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kecurangan (Mochammad Ridwan et al., 2021). Teori ini membantu menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan di perusahaan dengan mengurangi tiga faktor utama (tekanan, peluang, dan pembenaran) melalui pengendalian internal yang efektif, komite audit yang independen, dan *whistleblowing system*, perusahaan dapat mencegah risiko kecurangan. Teori ini menyoroti pentingnya tata kelola dan sistem anti-*fraud* dalam mencegah dan meminimalkan peluang bagi pelaku kecurangan (Wahyuningtyas, 2023).

Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan bisa diartikan sebagai bentuk perbuatan penipuan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada pelaku, sementara pihak yang menjadi korban mengalami kerugian finansial (Singleton et al., 2006). Menurut Astuti (2023) *fraud* merupakan bentuk dari kejahatan *white-collar* yang bersiat tidak terlihat karena terjadi pada lingkungan yang tertutup (Astuti, 2023). *Fraud* merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penipuan yang terencana dan mencerminkan ketidakjujuran. Tindakan ini dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset, manipulasi informasi, penghindaran tanggung jawab, pencurian, serta menutupi atau meelenyapkan fakta (D. N. Rahmatika, 2020). Proses terjadinya kecurangan mencakup tiga langkah utama, yaitu *act*, *concealment*, dan *conversion* (Bpkp, 2004).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sekumpulan prosedur yang dirancang guna memberikan proteksi pada seluruh elemen dalam struktur perusahaan. Sistem ini berperan penting dalam manajemen perusahaan dan menjadi elemen krusial untuk menjaga ketertiban (Mahendra et al., 2021). Fungsi utama sistem pengendalian internal adalah mengelola optimalisasi sumber daya untuk mencapai keuntungan dengan prinsip *cost* dan *benefit* (Bpkp, 2004). Anh et al. (2020) menyebutkan bahwa kontrol internal merupakan serangkaian prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh karyawan, dengan tujuan memastikan perusahaan dapat mencapai tujuannya melalui operasional yang efisien dan efektif, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem ini

dirancang untuk melindungi aset perusahaan, menjamin keakuratan serta keandalan informasi akuntansi, meningkatkan efektivitas, mematuhi kebijakan manajemen, dan memberikan kepastian yang cukup bahwa tujuan perusahaan bisa terwujud (Putra et al., 2022).

Komite Audit

Komite audit adalah suatu lembaga yang dibentuk dewan komisaris guna membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan mereka (OJK, 2015). Selain itu, tanggung jawab komite audit meliputi identifikasi area-area yang membutuhkan perhatian dewan direksi serta tugas-tugas terkait seperti penyusunan laporan keuangan dan pengawasan internal (KPEI, n.d.). Tujuan utama komite audit dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris untuk mengawasi kinerja manajemen, terutama saat proses penyusunan laporan keuangan (Tiapandewi et al., 2020). Profesionalisme komite audit menunjukkan bahwa anggotanya memiliki keahlian dan keterampilan khusus, terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan, sementara independensi komite audit menegaskan bahwa mereka tidak terikat atau dipengaruhi oleh pihak manapun (Rifai & Mardijuwono, 2020). Implementasi fungsi pengawasan dan kontrol yang optimal oleh komite audit dapat berperan pada pencegahan *fraud*, asalkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Mardani et al., 2020).

Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan potensi atau insiden kecurangan dan korupsi yang terjadi di dalam perusahaan, melibatkan pegawai dan individu lain (Bpkp, n.d.). Konsep sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) pada dasarnya merujuk pada pengungkapan informasi oleh karyawan yang dianggap melanggar hukum, peraturan, dan etika profesional, atau terkait dengan kecacatan prosedur, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik (Wardana et al., 2021). Sistem ini memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan kejahatan seperti kecurangan internal, dengan tujuan untuk menghindari kerugian perusahaan dan memastikan kelangsungan usaha (Maulida & Bayunitri, 2020). Implementasi sistem pelaporan pelanggaran di dalam perusahaan dapat menekan potensi terjadinya kecurangan (*fraud*), memberikan hambatan bagi para pelaku kecurangan, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan untuk melaporkan tindakan kecurangan yang ada di lingkungan perusahaan. (Sudjono, 2023).

PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Untuk mencegah kecurangan secara efektif, perusahaan perlu membentuk dan menerapkan sistem pengendalian internal (SPI) yang kokoh. Peluang terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh adanya kesempatan, yang dapat diminimalkan melalui implementasi SPI yang proporsional dan optimal. Hal ini sejalan dengan *fraud triangle theory*, yang mengidentifikasi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai tiga faktor utama dalam tindakan kecurangan. Maka dari itu, perusahaan harus memperkuat efektivitas SPI guna memastikan operasional berjalan lancar dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan perusahaan. SPI yang lemah dapat membuka kesempatan bagi karyawan untuk melakukan *fraud*. Semakin kuat SPI, semakin besar kemungkinan kecurangan dapat dicegah. Berdasarkan penelitian Mahendra et al. (2021) dan Rahmadanti (2021) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Mengacu uraian di atas, H1 dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Menurut *Fraud Triangle Theory*, komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang efisien dalam menurunkan tekanan, menutup celah kesempatan, dan menciptakan budaya yang mengurangi pembenaran terhadap tindakan kecurangan. Dengan mengaudit, mengevaluasi risiko, dan memberikan rekomendasi, komite audit membantu meminimalkan faktor-faktor yang memicu kecurangan. Komite audit yang berfungsi dengan baik memperkuat pengawasan atas laporan keuangan dan audit eksternal, sehingga mengurangi kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Peran komite audit sangat penting untuk memastikan audit internal berfungsi dengan baik dan hasil audit ditindaklanjuti dengan tepat, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pencegahan kecurangan. Hasil penelitian dari Trijayanti et al. (2021) mengungkapkan komite audit memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan di perusahaan. Namun, studi oleh Maisaroh & Nurhidayati

(2021) mengungkapkan komite audit tidak memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan. Mengacu uraian di atas, H2 untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

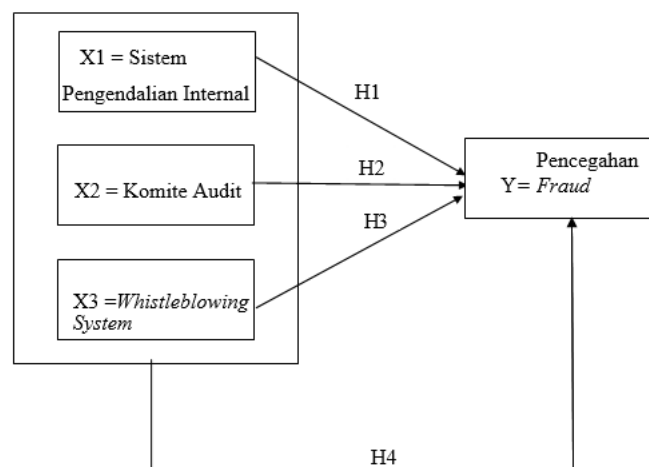
H2 : Komite audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud

Whistleblowing system adalah aspek penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan memberikan saluran bagi pelaporan pelanggaran atau perilaku menyimpang yang merugikan organisasi (KNKG, 2008). Implementasi sistem ini secara efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dengan menegaskan komitmen perusahaan terhadap kebijakan pelaporan, menyediakan mekanisme transparan, serta melakukan evaluasi berkala. Dalam *fraud triangle theory*, *whistleblowing system* membantu membatasi peluang terjadinya kecurangan dengan mengurangi kesempatan, salah satu elemen utama yang mendorong perilaku *fraud*. Dengan sistem pelaporan yang optimal, perusahaan dapat merespon laporan kecurangan secara efektif, memperkuat pencegahan *fraud*, dan menurunkan niat individu untuk bertindak curang. Studi yang dilaksanakan oleh Trijayanti et al. (2021), Dwi Pratopo & Wuryani (2023), Sugita & Khomsiyah (2023), Sakinah et al. (2023), dan Utami (2018) mengemukakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh pada pencegahan *fraud*. Sebaliknya, studi yang dilaksanakan Anlilua et al. (2023) mengemukakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Mengacu uraian di atas, H3 untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud

Sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* merupakan tiga elemen kunci yang saling berkaitan dalam mencegah *fraud* berdasarkan *fraud triangle theory*, yang mencakup tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pengendalian internal bertugas membatasi kesempatan untuk melakukan kecurangan melalui kebijakan dan prosedur yang efektif. Komite audit, sebagai pihak independen, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan laporan keuangan, serta memastikan kebijakan anti-*fraud* diterapkan dengan baik. Sementara itu, *whistleblowing system* memungkinkan deteksi dini potensi *fraud* dengan memberikan saluran aman bagi anggota organisasi untuk melaporkan kecurangan tanpa takut represi. Dengan sinergi ketiga elemen ini, potensi kecurangan dapat dikurangi melalui pembatasan kesempatan, identifikasi tekanan, dan pencegahan rasionalisasi tindakan *fraud*. Hasil studi oleh Budiman (2019) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan pada pencegahan kecurangan. Mengacu uraian di atas, H4 untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Sistem pengendalian internal, komite audit, dan whistleblowing system secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud



Gambar 2. Kerangka Konseptual
 Sumber: Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan memakai data sekunder yang didapatkan dari situs www.idx.co.id. Populasi yang diteliti mencakup seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022, sebanyak 47 perusahaan. Analisis

menggunakan regresi data panel dengan dukungan perangkat lunak *E-views* 12. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan perbankan di BEI, yakni secara parsial maupun simultan. Sampel penelitian terdiri dari 42 perusahaan subsektor perbankan yang tercatat di BEI periode 2020-2022, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan *sample* menggunakan kriteria khusus (Handayani, 2020). Berikut adalah kriteria yang ditetapkan peneliti untuk pemilihan *sample* pada penelitian ini (Rahmadanti, 2021):

Table 2. Proses Seleksi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang tercatat di BEI selama periode 2020-2022	47
2	Perusahaan perbankan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2020-2022.	(2)
3	Perusahaan perbankan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam penyajian laporan keuangan.	(0)
4	Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan konsisten selama periode 2020-2022.	(3)
5	Perusahaan perbankan yang tidak memberikan informasi mengenai <i>whistleblowing system</i> dalam laporan tahunan-nya selama periode 2020-2022.	(0)
6	Perusahaan perbankan yang tidak memberikan informasi mengenai komite audit dalam laporan tahunan-nya selama periode 2020-2022.	(0)
7	Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan informasi mengenai sistem pengendalian internal dalam laporan tahunan-nya selama periode 2020-2022.	(0)
Total sampel pertahun		42
Total sampel tahun 2020-2022		126

Sumber: Data Penelitian, 2024

Table 3. Pengukuran Variabel

Variabel	Konsep	Pengukuran
Pencegahan Fraud	Pencegahan kecurangan adalah tindakan manajemen dalam merumuskan peraturan, sistem, dan prosedur untuk menjamin bahwa dewan komisaris, manajemen, dan pegawai perusahaan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku (Rahmadanti, 2021).	Diukur menggunakan skala nominal, di mana diberikan nilai 1 (satu) jika perusahaan perbankan telah menerapkan kebijakan anti- <i>fraud</i> dan nilai 0 (nol) apabila belum menerapkannya.

Sistem Pengendalian Internal	Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang guna memberikan jaminan dalam menjaga berbagai aspek penting dalam struktur perusahaan (Mahendra et al., 2021).	Diukur menggunakan skala nominal, di mana diberikan nilai 1 (satu) jika perusahaan mengungkapkan secara lengkap kelima item efektivitas pengendalian internal menurut COSO dalam <i>annual report</i> , dan nilai 0 (nol) apabila tidak mengungkapkan kelima item tersebut secara lengkap sesuai dengan standar COSO dalam laporan tahunan.
Komite Audit	Komite audit didefinisikan oleh KNKG (2006) sebagai sekelompok individu yang ditunjuk oleh dewan komisaris dengan tujuan menjalankan tugas-tugas khusus, serta bertanggung jawab memastikan auditor dapat mempertahankan independensinya dari pengaruh manajemen.	$KA = \frac{\text{Jumlah anggota yang berkeahlian keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$
Whistleblowing System	<i>Whistleblowing system</i> adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan dan mengirimkan informasi mengenai dugaan tindakan korupsi yang sudah terjadi atau berpotensi terjadi, melibatkan baik karyawan maupun pihak lain dalam lingkungan perusahaan (Bpkp, n.d.).	$\text{Whistleblowig System} = \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah item menurut KNKG}} \times 100\%$

Sumber: Data Penelitian, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Table 4. Analisis Statistik Deskriptif

	SPI	KA	WBS	Y
Mean	0.790323	0.722534	0.597782	0.951613
Med	1.000000	0.750000	0.625000	1.000000
Max	1.000000	1.000000	0.937500	1.000000
Min	0.000000	0.059722	0.250000	0.000000
Std. Dev.	0.408730	0.283668	0.167410	0.215453
Skewness	-1.426372	-0.667989	0.060811	-4.209218
Kurtosis	3.034537	2.365927	2.440386	18.71751
Jarque-Bera	42.05326	11.29892	1.694457	1642.537
Probability	0.000000	0.003519	0.428601	0.000000
Sum	98.00000	89.59421	74.12500	118.0000
Sum Sq-Dev.	20.54839	9.897526	3.447203	5.709677
Observations	126	126	126	126

Sumber: Hasil Pengolahan E-views 12, 2024

Hasil analisis deskriptif mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), Komite Audit (KA), dan *Whistleblowing System* (WBS) di perusahaan yang diteliti cukup baik, dengan beberapa variasi antar perusahaan. *Mean* SPI sebesar 0.790323 dengan *std. deviasi* 0.408730, menunjukkan penerapan yang cukup tinggi namun dengan variasi yang signifikan. Komite Audit (KA) memiliki rata-rata 0.722534 dan *std. deviasi* 0.283668, mengindikasikan efektivitas yang cukup baik meskipun terdapat sedikit perbedaan antar perusahaan. WBS memiliki nilai *mean* sebesar 0.597782 dan *std. deviasi* yang lebih rendah yakni 0.167410, menandakan implementasi yang relatif merata tetapi masih bisa ditingkatkan. Variabel dependen, pencegahan *fraud* (Y), memiliki nilai *mean* 0.951613 dengan *std. deviasi* 0.215453, hal tersebut mengindikasikan sebagian besar perusahaan memiliki mekanisme pencegahan *fraud* yang sangat baik, meskipun terdapat beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Nilai *skewness* dan *kurtosis* untuk setiap variabel mengindikasikan bahwa distribusi data tidak sepenuhnya normal, namun hasil ini menegaskan perlunya peningkatan konsistensi dalam implementasi SPI, KA, dan WBS untuk memperkuat upaya pencegahan *fraud* di seluruh perusahaan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji *Chow* merupakan metode yang dipakai untuk memilih model yang tepat antara CEM dan FEM, dalam analisis data panel (Amaliah et al., 2020). Berikut ini adalah kriteria untuk pengambilan keputusan dalam uji *Chow*:

- 1) Apabila p -value untuk *cross section Chi-Square* $< \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai probabilitas (p -value) dari uji F $< \alpha$ 0,05 (5%), sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).
- 2) Apabila p -value untuk *cross section Chi-Square* $\geq \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai probabilitas (p -value) dari uji F $\geq \alpha$ 0,05 (5%), sehingga model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Table 5. Hasil Uji Chow

Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.905065	(41,79)	0.6308
Cross-section Chi-square	47.748697	41	0.2175

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 5, hasil uji *chow* memperlihatkan nilai *prob.chi-square* sebesar 0,2175 lebih tinggi dibandingkan tingkat α 0,05 (5%), yakni $0,2175 > 0,05$. Pada hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa penggunaan uji CEM lebih sesuai dalam penelitian ini, dibandingkan dengan uji FEM.

Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan guna menentukan model regresi yang paling sesuai antara uji CEM dan uji REM. Pengujian ini didasarkan pada metode *Breusch-Pagan*, yang menganalisis signifikansi REM berdasarkan residu dari CEM. Kriteria keputusan dalam uji LM adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai *Breusch-Pagan (both)* $> 0,05$, sehingga model yang digunakan yaitu *Common Effect Model* (CEM).
- 2) Apabila nilai *Breusch-Pagan (both)* $< 0,05$, sehingga model yang digunakan yaitu *Random Effect Model* (REM).

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.436633 (0.5088)	6.830702 (0.0090)	7.267335 (0.0070)
Honda	-0.660782 (0.7458)	2.613561 (0.0045)	1.380823 (0.0837)
King-Wu	-0.660782 (0.7456)	2.613561 (0.0045)	2.409600 (0.0080)

Standardized Honda	-0.569752 (0.7156)	3.779311 (0.0001)	-3.584864 (0.9998)
Standardized King-Wu	-0.569752 (0.7156)	3.779311 (0.0001)	0.530931 (0.2977)
Gourierioux, et al*	--	--	6.830702 (0.0127)

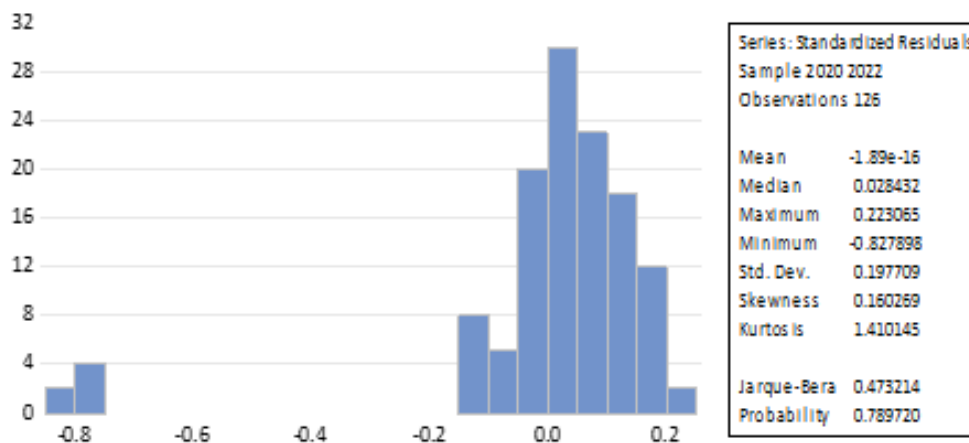
Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 6, hasil uji LM memperlihatkan bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,5088 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi *alpha* 5%, yaitu $0,5088 > 0,05$. Berdasarkan hasil ini, bisa disimpulkan, pemilihan uji CEM lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, dibandingkan uji REM. Pengujian yang dilakukan mengindikasikan bahwa uji CEM adalah model terbaik diantara model lainnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan uji CEM sebagai dasar untuk regresi data panel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas di *software E-Views* diuji menggunakan uji *jarque-bera*. Probabilitas dari uji *jarqueBera* digunakan sebagai penilai normalitas distribusi data. Data dianggap terdistribusi normal, apabila nilai probabilitas melebihi 0,05. Hasil uji *jarque-bera* disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari gambar 4, terlihat bahwa nilai *prob. Jarque-Bera* 0,789720 lebih tinggi daripada tingkat signifikansi *alpha* yang ditetapkan yaitu 5%, atau $0,789720 > 0,05$. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Table 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	SPI	KA	WBS
SPI	1.000000	0.277156	0.153552
KA	0.277156	1.000000	0.003246
WBS	0.153552	0.003246	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 7, terlihat bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara masing-masing variabel independen, yakni SPI, KA, dan WBS. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi antar variabel independen yang seluruhnya berada di bawah 0,9 ($< 0,9$).

Uji Heterokedastisitas

Table 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistics	0.132067	Prob. F (8,117)	0.8040
Obs*R-squared	0.433609	Prob. Chi-square (8)	0.8019
Scaled explained SS	0.437230	Prob. Chi-square (8)	0.8044

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 8, menunjukkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas, karena nilai *probability-Obs*R-Squared* $0,8019 < 0,05$, sehingga hasil ini mengindikasikan bahwa data bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Table 9. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistics	0.883218	Prob. F (2,120)	0.8161
Obs*R-squared	0.627897	Prob. Chi-square (2)	0.8009

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 9, terlihat nilai *Prob. Chi-Square* 0,8009 lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikansi alpha yang ditetapkan yakni 5% atau $0,8009 > 0,05$, sehingga hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Analisis *Common Effect Model* (CEM)

Table 10. Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob.
C	1.183929	0.082097	14.42113	0.0000
SPI	0.129836	0.046549	2.789249	0.0061
KA	-0.084461	0.066276	-1.274396	0.2050
WBS	-0.458197	0.109197	-4.196068	0.0001
R-squared	0.157931	Mean dependent var		0.951613
Adjusted R-squared	0.136879	S.D.dependent var		0.215453
S.E.of regression	0.200165	Akaike info criterion		-0.347619
Sum squared resid	4.807943	Schwarz criterion		-0.256642
Log likelihood	25.55238	Hannan-Quinn criter.		-0.310662
F-statistic	7.502036	Durbin-Watson stat		2.281350
Prob(F-statistic)	0.000121			

Sumber: Hasil Pengolahan *E-views* 12, 2024

Dari tabel 10, menunjukkan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 1.183929 + 0.129836SPI_{it} - 0.084461KA_{it} - 0.458197WBS_{it}$$

Penjelasan mengenai persamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 1,183929 menunjukkan nilai konstanta. Hal ini menunjukkan, jika seluruh nilai variabel independen (bebas) sama dengan nol, sehingga nilai variabel Y (pencegahan *fraud*) ialah 1,183929.
2. Koefisien sistem pengendalian internal = 0,129836. Hal ini mengartikan, apabila variabel lainnya tetap konstan, maka peningkatan sebesar 1 satuan dalam SPI akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,129836. Koefisien positif ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara SPI dan pencegahan *fraud*. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi SPI, semakin besar pula pencegahan terhadap *fraud*.
3. Koefisien komite audit = -0,084461. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila variabel lainnya tetap konstan, maka peningkatan sebesar 1 satuan dalam komite audit akan mengurangi pencegahan *fraud* sebesar 0,084461. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif atau berlawanan arah antara komite audit dan pencegahan *fraud*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan komite audit akan menyebabkan penurunan dalam pencegahan *fraud*.
4. Koefisien *whistleblowing system* = -0,458197. Hal ini mengartikan, apabila variabel lainnya tetap konstan, maka peningkatan sebesar 1 satuan dalam WBS akan mengurangi pencegahan *fraud* sebesar 0,458197. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara WBS dan pencegahan *fraud*. Maka, dapat disimpulkan bahwa peningkatan *whistleblowing system* akan mengakibatkan penurunan dalam pencegahan *fraud*.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t statistik bertujuan untuk menguji pengaruh signifikansi dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan tabel 10, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

Nilai t-hitung untuk sistem pengendalian internal adalah 2,78 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Mengacu pada t-tabel yang digunakan dengan derajat kebebasan (df) 100 dan tingkat signifikansi 5% (0,05), nilai t-tabel yang didapatkan yakni 1,65. Karena t-hitung 2,78 lebih besar dari t-tabel 1,65 dan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05, maka H1 diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

1. Nilai t-hitung untuk komite audit sebesar -1,27 dengan tingkat signifikansi 0,20. Mengacu pada t-tabel dengan derajat kebebasan (df) 100 dan tingkat signifikansi 5% (0,05), nilai t-tabel yang didapatkan adalah -1,65. Karena t-hitung -1,27 lebih besar dari t-tabel yakni -1,65 dan nilai signifikansi 0,20 lebih besar dari alpha 0,05, maka H2 ditolak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
2. Nilai t-hitung untuk *whistleblowing system* adalah 4,19 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Mengacu pada t-tabel dengan derajat kebebasan (df) 100 dan tingkat signifikansi 5% (0,05), nilai t-tabel yang didapatkan adalah -1,65. Karena t-hitung sebesar 4,19 lebih kecil dari t-tabel -1,65 dan nilai signifikansi 0,00 lebih rendah dari alpha 0,05, maka hipotesis H3 diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilaksanakan guna mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini, diharapkan nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05. Pada tabel 10, hasil pengujian menunjukkan probabilitas sebesar 0,00, yang berarti lebih rendah dari 0,05, serta nilai F-hitung 7,50, yang lebih besar dari nilai F-tabel 3,06. Hasil tersebut memenuhi kriteria yang mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system*, secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, H4 diterima, yang menegaskan bahwa semua variabel independen tersebut berpengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Mengacu hasil analisis regresi data panel dan beberapa uji dipilih, temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap upaya pencegahan

kecurangan, maka H1 disetujui. Artinya, semakin efektif implementasi dan pelaksanaan SPI, semakin besar kemampuan perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal yang berjalan dengan optimal akan memastikan kegiatan operasional berlangsung efisien dan efektif, sehingga kesalahan dalam proses operasional dapat diminimalkan (Agustina & Wafa, 2023).

Berdasarkan *fraud triangle theory*, temuan penelitian ini selaras dengan teori tersebut, karena sistem pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi elemen kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan. Dengan kontrol internal yang baik, peluang bagi karyawan untuk melakukan *fraud* menjadi semakin kecil karena prosedur dan mekanisme pencegahan lebih efektif. Selain itu, sistem pengendalian internal dapat mengurangi tekanan (*pressure*) dengan menciptakan lingkungan kerja yang etis, serta menetapkan norma yang jelas, sehingga karyawan merasa didukung untuk berperilaku jujur. Pembenaan (*rationalization*) terhadap tindakan curang juga dapat diminimalisasi dengan norma yang kuat, mendorong karyawan untuk mempertimbangkan kembali tindakan mereka.

Setiap perusahaan perlu mempunyai SPI yang efektif sehingga kesalahan dalam proses operasional dapat diminimalkan, selain itu harus diterapkan secara koheren guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam penerapan SPI, terdapat lima komponen sentral yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Herawaty & Hernando, 2021). Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal guna memastikan kelancaran dan kesehatan operasional perusahaan.

Penelitian ini selaras dengan temuan yang diperoleh Mahendra et al. (2021), Hartono & Nugroho (2022), Novandalina et al. (2021), dan Rahmadanti (2021), yang menjelaskan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun, penelitian ini bertentangan terhadap hasil studi Dwi Pratopo & Wuryani (2023) yang menjelaskan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, hal tersebut terjadi karena akan selalu ada peluang terjadinya *fraud* pada industri perbankan, baik sistem pengendalian internal kuat ataupun lemah.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pencegahan *Fraud*

Mengacu hasil analisis regresi data panel dan beberapa uji dipilih, temuan ini mengindikasikan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga H2 tidak disetujui. Salah satu faktor penyebab komite audit tidak efektif dalam mencegah *fraud* adalah kurangnya optimalnya pelaksanaan tugas, yang dapat disebabkan oleh anggota komite perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Pada beberapa perusahaan, termasuk di sektor perbankan, beberapa anggota komite audit sering kali tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan, seperti kurang memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup dalam akuntansi. Selain itu, jumlah anggota komite audit yang berkompeten dalam akuntansi keuangan sering kali lebih sedikit dibandingkan total keseluruhan anggota komite audit. Akibatnya, sebagian besar anggota komite audit kurang berkontribusi pada upaya pencegahan *fraud* di perusahaan.

Berdasarkan *fraud triangle theory*, temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori tersebut, karena jika anggota komite audit yang independen dan berkeahlian di bidang akuntansi keuangan lebih sedikit dibandingkan total anggota komite audit, efektivitas pengawasan dapat terganggu. Hal ini menciptakan kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan *fraud* yang tetap ada. Selain itu, jika komite audit tidak berfungsi secara efektif, elemen tekanan (*pressure*) untuk berperilaku etis akan berkurang, yang dapat memunculkan pembenaan (*rationalization*) bagi individu untuk berbuat curang. Kurangnya keahlian juga dapat menyebabkan komunikasi yang kurang efektif pada komite audit dan auditor internal, yang seharusnya bersinergi dalam mengoptimalkan pengawasan. Peran komite audit sangat penting dalam mengelola perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal, dan memastikan bahwa hasil audit diberikan tindak lanjut yang adekuat. Maka dari itu perusahaan wajib memilih dan menyeleksi anggota komite audit yang independen, berkompeten dalam bidang keuangan serta akuntansi. Dengan adanya komite audit yang efektif, perusahaan memiliki peluang lebih baik untuk mencegah terjadinya *fraud* dan melindungi aset serta reputasi mereka, selain itu keberadaannya diharapkan mampu memaksimalkan pengawasan atas laporan keuangan dan proses audit eksternal, sehingga perilaku oportunistik manajemen, seperti manipulasi laba, dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021), Sakinah et al., (2023) dan Rahmadanti (2021), yang mengemukakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap

pengecahan *fraud*, tetapi hasil penelitian ini bertolak berlawanan dengan penelitian [Trijayanti et al. \(2021\)](#) dan [Mardani et al. \(2020\)](#), yang menunjukkan bahwa peran komite audit yang optimal berkontribusi mencegah terjadinya *fraud*.

Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud

Mengacu hasil analisis regresi data panel dan beberapa uji dipilih, temuan ini mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* (WBS) berpengaruh negatif signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan, sehingga H3 diterima. Penerapan WBS yang maksimal secara signifikan berperan dalam mengurangi insiden kecurangan, sehingga mendukung upaya pencegahan secara keseluruhan. Pengaruh ini muncul karena penerapan WBS mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh KNKG, di mana setiap perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan telah disesuaikan dengan 16 mekanisme yang direkomendasikan oleh KNKG ([Wahyuningtiyas, 2023](#)). Dengan demikian, WBS dapat berjalan efektif dengan memperhatikan kebutuhan *whistleblower* atau pelapor.

WBS berfungsi sebagai deteksi dini terhadap tindakan *fraud* yang belum dapat diidentifikasi langsung oleh perusahaan. Dengan deteksi dini melalui mekanisme WBS, perusahaan dapat menindaklanjuti laporan dengan lebih cepat sebelum kasus *fraud* berkembang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak. Sistem ini berperan sebagai mekanisme efektif yang mendorong individu berintegritas untuk melaporkan tindakan *fraud*, sehingga memungkinkan pencegahan dan deteksi lebih awal. Penerapan sanksi terhadap pelaku *fraud* sebagai hasil dari implementasi WBS yang efektif juga menurunkan motivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas tidak etis, yang pada akhirnya menurunkan frekuensi kejadian *fraud* yang dilaporkan.

Berdasarkan *fraud triangle theory*, temuan penelitian ini selaras dengan teori tersebut, dimana WBS berperan mengurangi tiga elemen utama yang mendorong munculnya *fraud*, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Penerapan WBS berfungsi untuk mengurangi tekanan (*pressure*) dengan memberikan saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan perilaku curang. Sistem ini juga mengurangi kesempatan (*opportunity*) karena individu yang berniat melakukan kecurangan menyadari bahwa tindakan mereka lebih mungkin terdeteksi. Selain itu, WBS dapat mengurangi pembenaran (*rationalization*), dengan menegaskan bahwa perusahaan tidak mentolerir kecurangan dan mendorong budaya integritas.

Agar WBS dapat berfungsi efektif dan optimal dalam mencegah serta mendeteksi *fraud*, perusahaan perlu menyusun kebijakan yang jelas dan komprehensif, menjamin anonimitas serta perlindungan bagi pelapor, serta menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses ([Wahyuningtiyas, 2023](#)). Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan berkala bagi karyawan terkait pentingnya melaporkan pelanggaran. Tindak lanjut terhadap laporan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pengawasan independen untuk memastikan objektivitas. Evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala juga penting untuk menjaga efektivitas WBS dalam mencegah potensi *fraud* di lingkungan perusahaan. Dengan saluran pelaporan yang mudah diakses, WBS berkontribusi pada deteksi dan pencegahan *fraud* lebih awal.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian [Trijayanti et al. \(2021\)](#), [Dwi Pratopo & Wuryani \(2023\)](#), [Sugita & Khomsiyah \(2023\)](#), [Sakinah et al. \(2023\)](#), dan [Utami \(2018\)](#) yang memaparkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh dalam pencegahan kecurangan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan [Anlilua et al. \(2023\)](#) yang memaparkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan, karena para karyawan tidak ada pernyataan komitmen akan kesediaannya menjalankan sistem.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komite Audit, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud.

Mengacu hasil analisis regresi data panel dan beberapa uji dipilih, temuan ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yang mencakup sistem pengendalian internal (SPI), komite audit, dan *whistleblowing system* (WBS), secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga H3 diterima. Hasil memperlihatkan bahwa dalam hubungan simultan, komite audit dapat memanfaatkan informasi dari WBS sebagai masukan dalam proses pengawasan, guna memastikan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal. Kolaborasi antara sistem pengendalian internal dan komite audit dalam merumuskan kebijakan pengawasan memperkuat SPI secara keseluruhan, sehingga menciptakan lingkungan yang kokoh dan proaktif dalam

mencegah serta mengatasi potensi *fraud* di perusahaan. Perusahaan dapat memastikan efektivitas SPI, komite audit, dan WBS dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* dengan menetapkan kebijakan kontrol yang kuat, melatih karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan memahami prosedur pelaporan, serta menjaga independensi komite audit untuk memastikan pengawasan yang akurat. Kolaborasi antarfungsi antara pengendalian internal, komite audit, dan sistem pelaporan sangat penting untuk mengintegrasikan upaya pencegahan *fraud*.

Berdasarkan *fraud triangle theory*, temuan penelitian ini selaras dengan teori tersebut, dimana ketiga variabel ini secara simultan menciptakan lingkungan yang proaktif dalam mencegah *fraud* dengan mengurangi kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan melalui kontrol yang ketat dan prosedur yang jelas. *Whistleblowing system* yang transparan tidak hanya memberi karyawan saluran untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga mengurangi tekanan (*pressure*) untuk terlibat dalam tindakan tidak etis, karena mereka merasa didukung untuk bertindak sesuai dengan integritas. Pengawasan yang efektif oleh komite audit juga membantu menghilangkan pembenaran (*rationalization*) bagi individu untuk melakukan kecurangan, karena ketidakmungkinan untuk meyakinkan diri bahwa tindakan curang dapat dibenarkan. Kolaborasi ketiga variabel ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga secara efektif mengurangi elemen-elemen kunci dari *fraud triangle*, memastikan bahwa individu di dalam organisasi memiliki sedikit ruang untuk bertindak curang. Hasil penelitian ini searah dengan Budiman (2019) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2020-2022. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. *Whistleblowing system* berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Semakin optimal implementasi SPI, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam mencegah kecurangan. SPI yang kuat mengurangi peluang karyawan perusahaan untuk melakukan *fraud* dengan memperkuat prosedur dan mekanisme pengawasan, serta menciptakan lingkungan kerja yang etis dan transparan. Sebaliknya, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, hal tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan tugas komite audit, terutama karena kekurangan anggota yang memenuhi kualifikasi berkeahlian akuntansi dan keuangan. Kondisi ini melemahkan efektivitas pengawasan perusahaan, sehingga masih memberikan kesempatan bagi tindakan *fraud*. Untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan *fraud*, perusahaan harus menjamin bahwa komite audit terdiri dari anggota yang independen dan mempunyai keahlian yang sesuai. Sementara itu WBS berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. WBS yang efektif berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap tindakan *fraud* dan secara signifikan mengurangi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan *fraud*. Dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mendukung anonimitas pelapor, WBS membantu menurunkan tekanan dan meminimalkan pembenaran untuk berperilaku curang. Oleh karena itu, *whistleblowing system* yang efektif secara langsung memperkuat pengawasan dalam perusahaan dan mencegah terjadinya peluang kecurangan. Ketika dianalisis secara bersamaan, sistem pengendalian internal, komite audit, dan *whistleblowing system* secara signifikan berperan dalam mencegah kecurangan. Ketiga variabel ini bekerja secara sinergis dalam mengurangi faktor-faktor *fraud triangle*, yakni *opportunity*, *pressure*, dan *rationalization*, dengan menciptakan kontrol ketat, memberikan saluran pelaporan yang aman, serta memperkuat pengawasan. Dengan demikian, penerapan ketiga sistem ini menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan secara proaktif mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud* dalam perusahaan.

SARAN

Saran Teoritis

Penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memperluas variabel dengan menambahkan elemen seperti audit secara mendadak, audit internal, *good corporate governance*, dan budaya organisasi. Penambahan variabel ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor tambahan yang memengaruhi efektivitas dalam pencegahan *fraud*. Selain itu, dengan memperpanjang periode

observasi yang mencakup lebih banyak tahun dan perusahaan perbankan yang tercatat di BEI, hasil penelitian bisa menjadi lebih mendalam. Disarankan pula untuk menggunakan perangkat analisis modern seperti JAMOVI, PSPP, dan SOFA untuk meningkatkan akurasi dan validitas hasil penelitian.

Saran Praktis

Perusahaan perbankan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk memperkuat upaya pencegahan *fraud*, dengan proaktif mengidentifikasi risiko yang mungkin belum sepenuhnya diatasi oleh sistem pengendalian internal yang ada. Peningkatan strategi pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui audit internal yang lebih sering, termasuk audit mendadak, serta penguatan budaya organisasi yang menjunjung transparansi. Selain itu, penguatan *whistleblowing system* juga perlu dioptimalkan untuk mendeteksi potensi *fraud* lebih awal.

REFERENSI

- Agustina, S., & Wafa, Z. (2023). *The Determinants of Accounting Fraud Tendency*. Retrieved from <file:///C:/Users/USER/Downloads/4440-Article%20Text-13315-1-10-20240203.pdf>
- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2). <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Anh, T. C., Tran Thi, L. H., Quang, H. P., & Thi, T. T. (2020). Factors influencing the effectiveness of internal control in cement manufacturing companies. *Management Science Letters*, 10(1). <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.009>
- Anlilua, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Rusmita, S. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud. In *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan (Kiafe) 2023*, 1(3). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/73779>
- Astuti, T. D. (2023). Akuntansi Forensik dan Investigasi. In Efitra (Ed.), *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Di Berbagai Sektor* (pp. 178–190). Sonpedia Publishing Indonesia .
- Bpkp. (n.d.). *Whistleblower System*. Bpkp.Go.Id. Retrieved April 18, 2024, from <https://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1911/Whistleblower-System.bpkp>
- Bpkp. (2004). *PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN OLEH INTERNAL AUDITOR*. Bpkp.Go.Id. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf
- Budiman, M. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Risk Based Audit, Komite Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan. In *repository.uinsaizu.ac.id* (Issue November).
- Dwi Pratopo, R., & Wuryani, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3). <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.257>
- Handayani, R. (2020). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. In *Andi Offset* (Issue April).
- Hartono, A. B., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan intervening good corporate governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%204.1302>
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And BusineSS*. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)*. <http://www.governance-indonesia.com/>
- KPEL. (n.d.). *KOMITE AUDIT*. ID CLEAR. Retrieved April 18, 2024, from <https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite-audit>
- Mahendra, K. Y., Erna Trisna Dewi, A. A. A., & Rini, G. A. I. S. (2021). Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bumnd di Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2904.1-4>

- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1). <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9927>
- Maulida, W., & Bayunitri, B. (2020). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(4), 273–292. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Mochammad Ridwan, Ida Suraida, Budi Septiawan, & Erfiyana Arsika Dewi. (2021). Skeptisisme Auditor dan Dimensi Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.78>
- Novandalina, A., Tri Adriyanto, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, S. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness Dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank BCA KCU Semarang. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 4(1). Retrieved from <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/115>
- OJK. (2015). *POJK tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit*. OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Pembentukan-dan-Pedoman-Pelaksana-Kerja-Komite-Audit.aspx>
- Pricylia, D. A., & Budiantara, M. (2023). Pendeteksian Fraud Dalam Laporan Keuangan dengan Cash Flow Shenanigans pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5485>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). The Influence Of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System And Big Data Analytics On The Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Rahmadanti, S. (2021). *Pengaruh Audit Internal, Komite Audit, Whistleblowing System Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020*. Retrieved from <https://repository.uin-suska.ac.id/57470/>
- Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris* (D. Rahmatika, Ed.). Deepublish.
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2). <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>
- Sakinah, D. A., Fithri Meuthia, R., & Dwiharyadi, A. (2023). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Potensi Terjadinya Fraud Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 2(2), 19–29. <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- Sari, N. I., & Majid, J. (2021). Peran Whistleblower Dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26850>
- Singleton, Tommy. W., Aaron, J. S., G, J. B., & Robert, J. L. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*.
- Sudjono, A. C. (2023). Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.296>
- Sugita, S., & Khomsiyah, K. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 686–697. <http://sosains.greenvest.co.id>
- Tarasita, F., Akhmad, A., Maswar, R., & Priyadi, P. (2020). Kebijakan dan Implementasi Strategi Anti-Fraud pada Bank Umum. *InFestasi*, 16(2). Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/8469>
- Tiapandewi, N. K. Y., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2020). Dampak Fraud Triangle Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Kharisma*, 2(2).
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Padwa Sari, G. (2021). *Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud*. <https://journal.unimma.ac.id>

- Utami, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan Perusahaan Sektor Jasa Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.6>
- Wahyuningtiyas, T. N. (2023). *PENGARUH GOOD CORPORATE Governance, Whistleblowing System, Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Tindakan Fraud Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021*. Retrieved from <file:///C:/Users/USER/Downloads/28e8934abcc639ffb789d8254d3b2aff.pdf>
- Ziah, S. U., & Kuntadi, C. (2023). PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK KEMAMPUAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi pada Kantor BPKP Makassar). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.341>